

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

Pemprov dan DPRD DKI Bakal Bahas Kepemilikan Saham JIEP Lewat Revisi Perda

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho

DPRD DKI Jakarta akan segera membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada November 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

Ketiga Raperda tersebut masing-masing Raperda tentang Perseroan

Terbatas [Jakarta Industrial Estate Pulogadung](#) (Perseroan Daerah), Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit.

Kemudian Raperda tentang Penyertaan Modal Perseroan

Terbatas [Jakarta Industrial Estate Pulogadung](#) (Perseroan Daerah).

"Harus segera, biar Januari segera running. Jadi di tengah kesibukan dewan bahas APBD, kami harus segera selesaikan juga yang mendesak untuk dua BUMD kita," ujar Khoirudin pada Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, PT JIEP membutuhkan payung hukum untuk mendapatkan penambahan modal.

Alokasi penambahan modal untuk JIEP mencapai Rp 250 miliar, agar mayoritas sahamnya dimiliki [Pemprov DKI Jakarta](#), dibanding pemerintah pusat.

"PT JIEP menambah modal agar mayoritas sahamnya dimiliki [Pemprov DKI Jakarta](#). Uang yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak ini akan kembali lagi ke kas daerah," katanya.

Khoirudin menjelaskan, melalui kepemilikan saham mayoritas [Pemprov DKI Jakarta](#) di PT JIEP diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Apalagi perseroan itu memiliki fokus di bidang tenaga kerja, perumahan atau ketahanan pangan.

"Kami ingin PT JIEP bermanfaat banyak buat warga dan [Pemprov DKI Jakarta](#)," ungkapnya.

Sementara itu Direktur Utama PT. JIEP Satrio Witjaksono menjelaskan, Perda tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum dalam menjalankan program-program pemerintah pusat dan [Pemprov DKI Jakarta](#). Apalagi kepemilikan saham korporasi masing-masing 50 persen dimiliki Pemprov dan [Pemprov DKI Jakarta](#).

"Ini dilakukan untuk mendukung program-program pemerintah pusat maupun Provinsi DKI Jakarta," imbuhnya.

Adapun tahapan dan jadwal pembahasan ketiga Raperda tersebut yakni, Kamis 7 November 2024 pukul 10.00 WIB DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Pejabat Gubernur terhadap ketiga Raperda tersebut.

Selanjutnya Jumat 8 November 2024 akan diselenggarakan rapat Fraksi-Fraksi untuk menyusun Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ketiga Raperda tersebut.

Kemudian, Senin 11 November 2024 DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan penyampaian jawaban Pejabat Gubernur atas Pemandangan Umum tersebut.

Lalu Rabu, 20 November 2024 pukul 13.00 WIB DPRD DKI Jakarta akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Eksekutif terkait guna menerima saran atau masukan dari Akademisi, Ormas atau Orsos, LSM dan Organisasi lainnya terhadap ketiga Raperda tersebut.

Selanjutnya, Kamis 21 November 2024 akan diselenggarakan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta bersama Komisi B dan C serta eksekutif untuk mendengarkan paparan eksekutif sekaligus menerima saran atau masukan terhadap ketiga Raperda tersebut.

Jumat 22 November 2024 dan Senin 25 November 2024 Bapemperda DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan materi ketiga Raperda tersebut.

Kemudian Selasa 26 November 2024 akan digelar Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta bersama pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan dan anggota Bapemperda serta Eksekutif. Agendanya, penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap ketiga Raperda.

Pada Senin 23 Desember 2024, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap ketiga Raperda. Setelah itu, permintaan persetujuan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta terhadap ketiga Raperda tersebut. Selanjutnya, Penyampaian Pendapat Akhir Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan penyerahan secara simbolis ketiga Raperda. (faf)